

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh:

INDAH RESKI RAMADANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107016



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

INDAH RESKI RAMADANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107016

Kepada

16/03/2021

100
Sub. Alumni

P/0022/1PM/2100
RAM
P¹

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Indah Reski Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

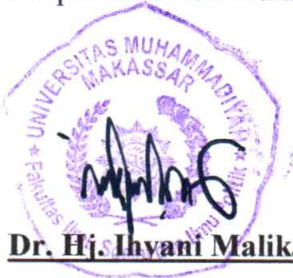
Pembimbing II


Drs. Ansyari Mone, M.Pd


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

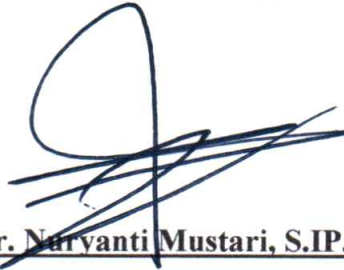
Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Naryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



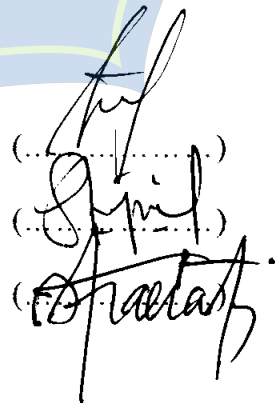
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Ahmad Harakan , S.IP., M.HI (ketua)
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indah Reski Ramadani

Nomor Stambuk : 105641107016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 15 Desember 2020

Yang Menyatakan,

Indah Reski Ramadani

ABSTRAK

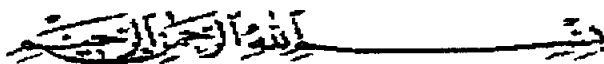
INDAH RESKI RAMADANI. 2020 Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Dibimbing Oleh Ansyari Mone Dan Nur Khaerah)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian yang ada di Kelurahan Cikoro diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan petani. hal ini ditunjukkan oleh adanya inovasi yang dilakukan kelompok tani bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan dibantu oleh masyarakat setempat. (b) Perancangan program meliputi tahapan tahapan penyelidikan, perumusan masalah kerja, penentuan tujuan dan target serta perumusan rencana kerja. Kunci yang berpengaruh pada proses perencanaan adalah Pemerintah Kelurahan Cikoro, Kelompok Tani dan masyarakat Kelurahan Cikoro. (c) Pelaksanaan program menunjukkan bahwa program yang dilakukan pemerintah, kelompok tani dan masyarakat berjalan dengan baik dilihat dari meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan pangan kelompok tani dan masyarakat Kelurahan Cikoro. (d) keterlibatan menunjukkan bahwa pihak pemerintah, masyarakat dan swasta melaksanakan program-program pemberdayaan yang menunjang masyarakat dan kelompok tani melalui pembinaan, penyuluhan dan pengawasan. (e) Dampak dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani ditemukan dampak positif yakni: menjadikan masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam mengelola pangan, adanya perubahan struktural perekonomian dalam meningkatkan ketahanan pangan, terjalinnya suatu mitra yang baik antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani dan petani, dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan keahlian masyarakat dalam bidang pertanian. Serta dampak negatif yakni munculnya kecemburuan sosial antara petani dan kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Inovasi Produk

KATA PENGANTAR



“ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu “

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”** shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Dahlan dan ibunda Saenab yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa	33
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Tompobulu	38



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

INDAH RESKI RAMADANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107016

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

INDAH RESKI RAMADANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107016

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat telah dijabarkan oleh Suharto (2010) bahwa pemberdayaan adalah sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Pendapat lain tentang pemberdayaan masyarakat oleh Robbins (dalam Saragi 2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang menggambarkan individu dan kelompok memperoleh kekuasaan, akses ke sumberdaya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka. Sejalan dengan itu Rappaport (dalam Saragi 2007), pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif dimana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses atau kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat.

Salah satu tugas pokok pemerintah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian perangkat pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community based resource management* (pengelolaan sumber daya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people center development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).

Memaknai beberapa defenisi tentang pemberdayaan masyarakat pada paragraf sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat salah satunya ialah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Pada penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dimana kelompok tani Kelurahan Cikoro memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan mengembangkan

dan membuat sebuah inovasi baru yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Kebutuhan akan hasil pertanian khususnya pangan akan terus bertambah karena kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali.

Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan telah disebutkan didalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang dimaksud ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi.

Ketahanan pangan dapat diukur berdasarkan indikator ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan. Ketersediaan pangan diukur dari ketersediaan konsumsi perkapita yang datanya diperoleh dari neraca bahan makanan Indonesia, Badan pusat statistik. Makin besar angka ketersediaan pangan untuk konsumsi, makin tersedia pangan di tingkat nasional. Makin tinggi konsumsi pangan rumah tangga, makin tinggi pula akses rumah tangga tersebut terhadap pangan.

Undang-undang pangan No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu,

perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Indonesia mengusung konsep ketahanan pangan dimana negara menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, selain terjamin mutu dan gizinya bagi setiap warga negara. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya, penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi pangan ini senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Suatu wilayah yang melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan ialah Kelurahan Cikoro yang merupakan salah satu Kel. dari delapan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (SulSel). Jarak dari Malakaji ibukota kecamatan ke Kelurahan Cikoro sejauh lima km. Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah 17,33 km persegi, merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu, luas ini setara 13,08 persen luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan, 12 rukun warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Cikoro sebagian besar wilayahnya berada pada lereng, secara morfologi daerah ini lebih dari 90 persen terdiri dari media berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 1000.50 meter dari atas permukaan laut. Dengan curah hujan sedang yaitu rata-rata 2.500 – 3.000 mm setiap tahunnya, dengan

suhu udara rata-rata berada pada 10C – 15C. (Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro 2019)

Penduduk yang berada di Kelurahan Cikoro umumnya hidup dari mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani kopi. Dimana mereka sangat bergantung pada daya beli masyarakat terhadap harga kopi. Dalam kondisi normal dimana harga kopi relatif tinggi, masalah ketahanan pangan bagi masyarakat Kelurahan Cikoro bukanlah masalah yang serius karena dengan stabilnya nilai jual kopi secara otomatis akan membuat daya beli masyarakat terhadap produk-produk pangan juga ikut stabil, namun ketika harga nilai kopi turun dari harga biasanya tidak dapat dipungkiri bahwa akan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk pangan yang berarti menurunnya ketahanan pangan masyarakat Kelurahan Cikoro. Daya beli masyarakat Kelurahan Cikoro dipengaruhi oleh stabilitas harga kopi.

Pemerintah kelurahan dan kelompok tani Kelurahan Cikoro bekerja sama dengan berkoordinasi ke kabupaten/kota untuk pengadaan pelatihan atau penyuluhan kepada petani kopi terkait dengan sektor pertanian khususnya tanaman kopi. Penyuluhannya ialah dengan menciptakan sebuah inovasi baru yaitu hasil dari penciptaan dan pengenalan produk baru yang berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang salah satunya diindikasikan dari meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga petani.

Sebuah usaha industri kopi Kelurahan Cikoro yang dikembangkan oleh kelompok tani Marakisaya Kelurahan Cikoro menjadi salah satu gebrakan baru dan menjadi sebuah inovasi dalam usaha dengan membuat jenis kopi yang berbeda dengan berbagai jenis kopi yang sudah ada, sehingga memberikan sebuah ciri khas tersendiri dibanding kopi lain. Banyaknya persaingan dari varian jenis kopi, industri kopi Kelurahan Cikoro harus memahami cara untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk dapat bersaing dalam orientasi pasar bebas dengan menciptakan keunggulan bersaing.

Hampir 80 persen penduduk Kelurahan Cikoro menggantungkan hidupnya dari komoditi kopi, sementara daya beli masyarakat terhadap produk-produk pangan dipengaruhi oleh stabilitas harga komoditi kopi. Seperti yang terjadi pada tahun 2007 dimana harga kopi menurun dari harga biasanya 5000 – 7000/ liter menjadi 3500/liter, penyebab menurunnya harga kopi tersebut di akibatkan karena banyaknya pasokan kopi dari petani-petani. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk pangan. Karena hal itu masyarakat membuat upaya supaya ketahanan pangan masyarakat tetap stabil maka perlu upaya-upaya yang dilakukan karena lahan pertanian masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan menanam beberapa tanaman lainnya seperti pisang, markisa, cengkeh dan sebagainya. Dengan demikian ketahanan pangan masyarakat kel. Cikoro tetap stabil. (Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro 2019)

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu:

Penelitian oleh Dekasari (2016) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi menemukan hasil bahwa di pemberdayaan petani di Desa Sambiroto dikatakan sudah lebih baik dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dimana produksi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan meningkat ini dikarenakan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam juga meningkat. Faktor pendorong utama keberhasilan peningkatan ketahanan di Desa Sambiroto adalah berjalannya program dengan adanya dukungan dari Disan Pertanian dan TMMD serta adanya bantuan berupa pupuk dan benih gratis. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, modal dan cuaca yang tidak menentu.

Penelitian oleh Laily (2014) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan (studi di Desa Betet Kecamatan

Ngronggot Kabupaten Nganjuk) menemukan hasil bahwa tentang pemberdayaan di Desa Betet dapat dikatakan sudah lebih baik dalam mewujudkan ketahanan pangan dimana produksi yang dihasilkan lebih baik dan meningkat, ini dikarenakan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam juga meningkat. Faktor pendukung utama keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Betet adalah berjalannya program dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah serta adanya bantuan subsidi dan benih. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan alat pertanian.

Penelitian oleh Prawoto (2012) dalam penelitiannya tentang model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (staregi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat Dieng di Provinsi Jawa Tengah) menemukan hasil bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng dilakukan treatment tersendiri untuk melindungi kehidupan mereka dan memberikan penyuluhan, bimbingan serta pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat Dieng khususnya menyangkut masalah ketahanan pangan. Secara obyektif kelekatan masyarakat Dieng dengan kondisi lingkungan alamnya yaitu pertanian dan hasilnya begitu erat. Kebutuhan hidup mereka ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam (SDA) terutama disektor pertanian. Melalui program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng berbasis kemandirian diharapkan dapat melindungi mereka dari resiko kelaparan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Menemukan hasil berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana pada penelitian penulis berfokus pada proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan dampak dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dengan menggunakan pendekatan konsep dari Widjajanti (2011) sebagai acuan dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cikoro. Setelah mengamati proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ditemukan hasil bahwa ada empat proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Cikoro yaitu: (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian berkat adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan kelompok tani. (b) Perancangan program pemberdayaan masyarakat meliputi tahapan penyelidikan, perumusan masalah, penentuan tujuan dan target serta perumusan rencana kerja. (c) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani berjalan dengan baik dilihat dari meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan pangan kelompok tani dan masyarakat Kelurahan Cikoro. (d) Keterlibatan menunjukkan bahwa pihak pemerintah, masyarakat dan swasta melaksanakan program-program yang menunjang dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro melalui pembinaan, penyuluhan dan pengawasan. Adapun dampak dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani ditemukan dampak positif dan

dampak negatif, meliputi: (a) dampak positif yakni menjadikan masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam mengelola pangan, meningkatkan keahlian masyarakat dalam bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (b) dampak negatif yakni munculnya kecemburuan sosial antara petani dan kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat,

B. Tinjauan Konsep dan Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu *empower* yang memberi kuasa atau wewenang. Konsep ini berkembang sejak tahun 1980-an dan digunakan oleh agen-agen pembangunan hingga sekarang. Sehingga pemberdayaan menjadi istilah yang sangat populer dikalangan para agen pembangunan masyarakat. Pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian power atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat (Ife dalam Tampubolon 2006).

Sedangkan pemberdayaan menurut World Bank (dalam Nikijuluw 2001) ialah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat menyangkut dua pihak yang saling terkait, yakni

pihak yang memberdayakan (pemerintah, lembaga-lembaga, maupun kelompok lainnya), dan masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan.

Defenisi lain dari pemberdayaan masyarakat dikemukakan oleh Chambers (dalam Poncokusumo 2017), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *peoplecentred, parcitipatory, empowering, and sustainable*.

Pandangan tentang pemberdayaan masyarakat menurut Ife (dalam Poncokusumo 2017), antara lain sebagai berikut:

- a) Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif;
- b) Plularis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *ruleofthegame* tertentu;
- c) Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
- d) Post strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas social.

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita (dalam Andayani 2017) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai proses menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Helen (2014) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Diharapkan pula peranan pemerintah daerah dan perangkatnya dapat mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Polity (2012) Paling tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah di daerah yang bersangkutan (melalui dukungan pemberdayaan ekonomi), dapat mengembangkan kapasitas atau kemampuan warga masyarakat di daerah untuk peningkatan kegiatan sosial ekonomi produktif warga setempat dan peningkatan kapasitas kelembagaan warga tersebut melalui pemberdayaan pendidikan, dan di dukung dengan pemberdayaan sosial budaya, psikologi dan politik warga. (Sugiri 2012)

Dengan demikian tidak hanya individu dan komunitas yang melakukan pemberdayaan melainkan juga diperankan oleh pemerintah. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat karena melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang pada gilirannya rakyat menjadi lebih sejahtera penghidupannya.

Dalam konteks pembiayaan program, bantuan dari pemerintah merupakan suatu upaya pembiayaan masyarakat, atau merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan daya (baik untuk sumber daya maupun modal, peluang, pengetahuan dan keadilan) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri mereka, agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. (Sugiri 2012)

Upaya dalam pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (dalam Margalong 2018) dapat dikaji dalam tiga aspek yaitu:

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

- b) *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- c) *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting.

Pemberdayaan masyarakat juga merujuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah agar mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan bebas dari kesakitan
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto dalam Yefni 2018).

Proses pemberdayaan menurut Widjajanti (2011) adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan dapat diukur melalui:

a) Kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.

Untuk melakukan peningkatan kualitas masyarakat dilakukan upaya pemberdayaan sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang tidak lepas dari sosial dan ekonomi masyarakat. pemberdayaan menurut Astuti (dalam Ruhayda 2012) adalah sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan, mengeksplorasi sumber daya lokal dan memprluas peran masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Dari defenisi diatas terdapat beberapa faktor penting dalam pemberdayaan, yaitu kapasitas masyarakat (individu dan kelompok) dan organisasi pendukung. Kapasitas masyarakat mengacu pada

tingkat kompetensi, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatur dan mencapai tujuan yang relevan

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang karena setiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b) Perencanaan program;

Perencanaan program menurut Bintaro (dalam Agustrian 2018) adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (dalam Sitorus 2005) mengatakan bahwa perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta meluruskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan mulai dari

penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan hingga sistem perencanaan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan bisa tercapai.

c) Pelaksanaan program

Pelaksanaan program menurut George (dalam Agustrian 2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan anggota perusahaan tersebut. Sedangkan pelaksanaan program menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan dan permotivasi agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

d) Keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai berbagai pihak yang ada dan terkait dengan masyarakat, mulai dari unsur

pemerintah, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program yang dikerjakan dalam masyarakat. Peran masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil yang dilakukan masyarakat.

Evaluasi menurut Herman (2016) adalah suatu penilaian berkala terhadap *relevansi*, prestasi, efisiensi dan dampak proyek konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi memanfaatkan sistem informasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama.

2. Konsep Ketahanan Pangan

Menurunnya ketahanan pangan di Indonesia diduga terkait langsung maupun tidak langsung dengan adanya perubahan lingkungan strategis domestic maupun internasional. Berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut adalah terjadinya gejolak bahkan meroketnya harga pangan dunia

tahun 2007/2008, meningkatnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan produksi biofuel/bioenergi dan perubahan iklim yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan (FAO dalam Purwaningsih 2008).

Undang-undang pangan No. 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Ketahanan pangan menurut Arifin (dalam Purwaningsih 2008) merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millennium ini. Sedangkan ketahanan pangan menurut FIVIMS (dalam Jonatan 2010) adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu, secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus, pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua adalah setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk

memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari kehari.

Ketahanan pangan berkolerasi sangat kuat dengan kemiskinan. Dampak dari krisis pangan tidak hanya dirasakan oleh buruh tani yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi juga oleh penduduk yang berprofesi sebagai buruh konstruksi, pekerja golongan rendah di bidang transportasi, nelayan dan perajin di pedesaan, bahkan oleh petani marjinal (IRRI dalam Faqi 2014). Ketahanan pangan berkelanjutan adalah wujud nyata dari kemandirian pangan: upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan adalah proses jangka panjang. Peluang untuk mencapai kemandirian pangan cukup besar, karena sumberdaya alam yang berupa lahan pertanian.

Mengacu pada definisi ketahanan pangan aspek yang perlu dicermati dalam pembangunan ketahanan pangan menurut Rachman (2005) adalah:

- a) Obyek akhir dimana ketahanan pangan harus diwujudkan dalam hal ini adalah rumah tangga;
- b) Syarat keharusan dan syarat kecukupan terwujudnya ketahanan pangan;
- c) Ketahanan pangan tingkat global, nasional, regional, lokal, rumah tangga merupakan suatu rangkaian hierarkhis;
- d) Ketahanan pangan dipandang sebagai sistem ekonomi pangan terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya sangat terkait;

- e) Perubahan lingkungan strategis domestik dan internasional berpengaruh terhadap pembangunan ketahanan pangan;
- f) Karakteristik inheren dalam masing-masing subsistem ketahanan pangan di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Perwujudan ketahanan pangan sangat ditentukan peran strategis sektor pertanian dalam arti luas selain menghasilkan pangan, sektor ini juga berkontribusi besar dalam peningkatan daya beli masyarakat melalui peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Secara global sekitar 36 persen penduduk dunia menggantungkan hidupnya dari pertanian. Bahkan untuk negara berkembang angkanya lebih tinggi lagi (ILO dalam Sumaryanto 2016).

Tiga pilar ketahanan pangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan ialah:

- a) Ketersediaan (*Availability*) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.
- b) Keterjangkauan (*Accessibility*) yaitu kemampuan suatu rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian

ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial.

- c) Stabilitas (*Stability*) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan sementara. kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana maupun konflik sosial.

Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing

C. Kerangka Fikir

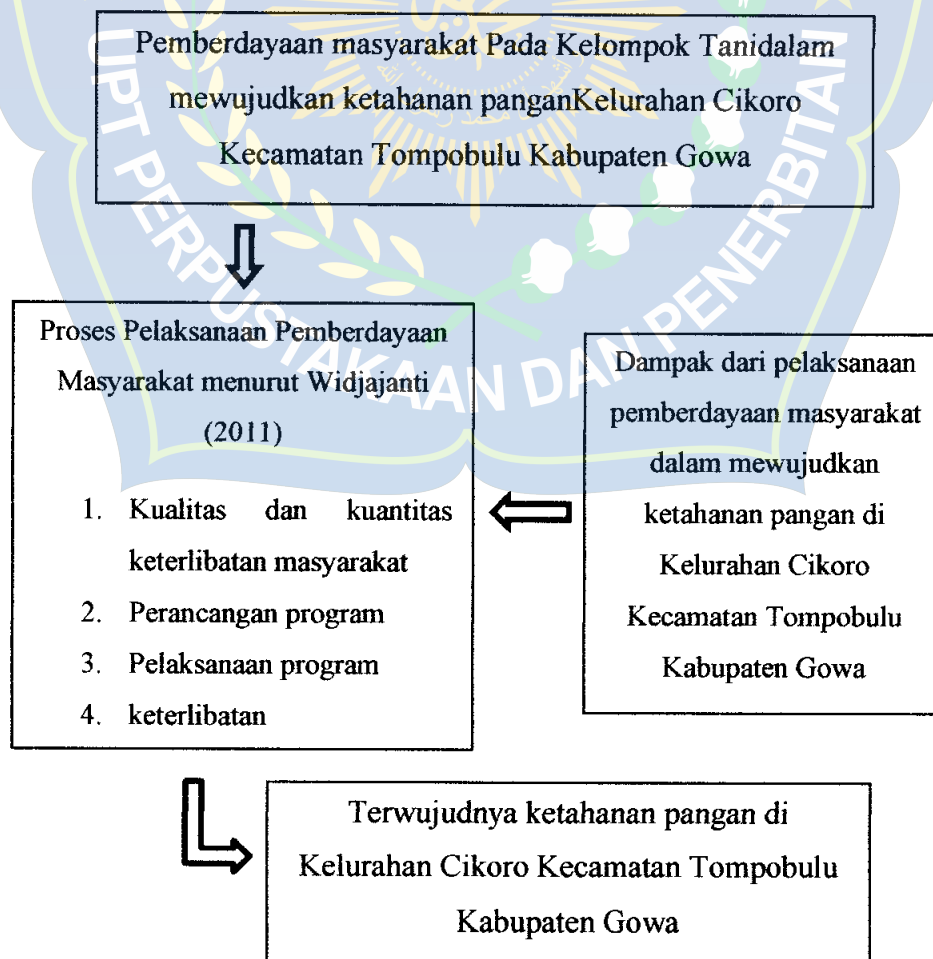
Ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani merupakan salah satu bentuk pengembangan pemanfaatan suatu sumber daya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Terwujudnya tingkat ketahanan pangan melalui sebuah pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal.

Dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat terkhusus kelompok tani dalam hal ini kopi oleh masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan setidaknya ada 3 pilar ketahanan pangan yang mutlak terpenuhi yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas, serta untuk memenuhi faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi suatu bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dari Widjajanti (2011) sebagai acuan dalam melihat Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikoro. Setelah mengamati proses pelaksanaan pemberdayaan maka akan tergambar seperti apa dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini. Apakah dapat mewujudkan ketahanan pangan, atau tidak berdampak. Olehnya itu, dibawah ini dibuat bagan kerangka pikir untuk memudahkan memahami alur pemikiran dalam penelitian ini.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir:



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu:

1. Proses pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan, di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Dampak pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka akan dikemukakan deskripsi fokusnya yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang salah satunya diindikasikan dari meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga petani
2. Indikator dari kualitas adalah banyaknya kelompok tani yang di berdayakan sedangkan indikator dari kuatitas adalah kemampuan kelompok tani setelah diberikat diklat atau penyuluhan terkait pekerjaan mereka.
3. Perancangan program yaitu pola pikir terstruktur yang melibatkan masyarakat diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama.

4. Pelaksanaan program, Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar pemerintah dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini.
5. Keterlibatan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam melakukan perancangan dan pelaksanaan program dan juga ikut memikul tanggung jawab didalamnya.
6. Dampak pemberdayaan masyarakat yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya ketahanan pangan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
7. Ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata serta terjangkau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cikoro karena mengangkat tema pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro, maka sangat relevan menjadikan masyarakat Kelurahan Cikoro sebagai subyek penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ada dua sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan kepustakaan.

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti yang menyangkut tentang pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara, jenis data yang ingin diperoleh adalah seputar proses pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Mukhlis SH	MK	lurah Cikoro
2.	Dr. Sabir, S.Pt, M.Si	SB	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa
3.	M. Roa	MR	Ketua Kelompok Tani Marakisaya
4.	Ahmad	AH	Anggota Kelompok Tani Marakisaya
5.	Mantang	MT	Petani Kopi Kelurahan Cikoro

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, baik data sekunder dan data primer, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*)

Dalam studi pustaka ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media *online*, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi lapangan (*Field research*)

Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Studi lapangan yang dimasukkan dalam skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan kepada kepala kelurahan, kelompok tani, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai observasi dan wawancara terhadap para informan. Wawancara dimaksudkan yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap memahami dan pelakon yang termaksud dalam tema penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono 2014). Dalam model interaktif ini terdapat empat komponen analisis utama yaitu komponen pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusioan Drawing and Verification*).

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi menurut Sugiyono (2014), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakana secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilatas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat di lakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada sub bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Gowa terkait Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Pada hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang profil Kabupaten Gowa, Profil Kecamatan Tompobulu dan Profil Kelurahan Cikoro.

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Gowa



Kabupaten Gowa terletak di sebelah selatan Kota Makassar. Ibu kota kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometer di sebelah selatan pusat kota Makassar yang dahulunya bernama

Kotamadia Ujung Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten Je'nepono, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sinjai.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tompolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattalassang, pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerjasama dengan pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-bili dengan luas kurang lebih 2.415 Km² yang dapat menyediakan air

irigasi seluas kurang lebih 24.600 Ha. Konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan Komposisi luas dan jarak dari sungguminasa sebagai ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Ibu kota kecamatan, jarak dan luas Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Kota/ Kab (Km)	Luas Kecamatan	Persen terhadap luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajen	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borong Loe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggimoncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tompolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangang	Sapaya	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04

18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
Jumlah				1.88,33	100

Dari tabel di letak atas letak penelitian penulis berfokus di Kecamatan Tompobulu. Kecamatan tomopobulu beribukota di Malakaji berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa. Merupakan daerah dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

Tompobulu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai pada sebelah utara, kabupaten Jeneponto sebelah kanan, Kecamatan Biringbulu sbalah barat dan Kabupaten Gowa disebelah timur. Keccamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan, berikut nama desa dan kelurahan di Kecamatan Tompobulu

- 1) Kelurahan Malakaji,
- 2) Kelurahan Cikoro,
- 3) Desa Datara,
- 4) Desa Rappolemba,
- 5) Desa Rappoala, dan
- 6) Desa Tanete.

a) Visi dan Misi Kabupaten Gowa

Perkembangan pembangunan pada sebuah daerah merupakan salah satu peran penting dalam mencapai sebuah visi dan misi sistem

pemerintahan. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

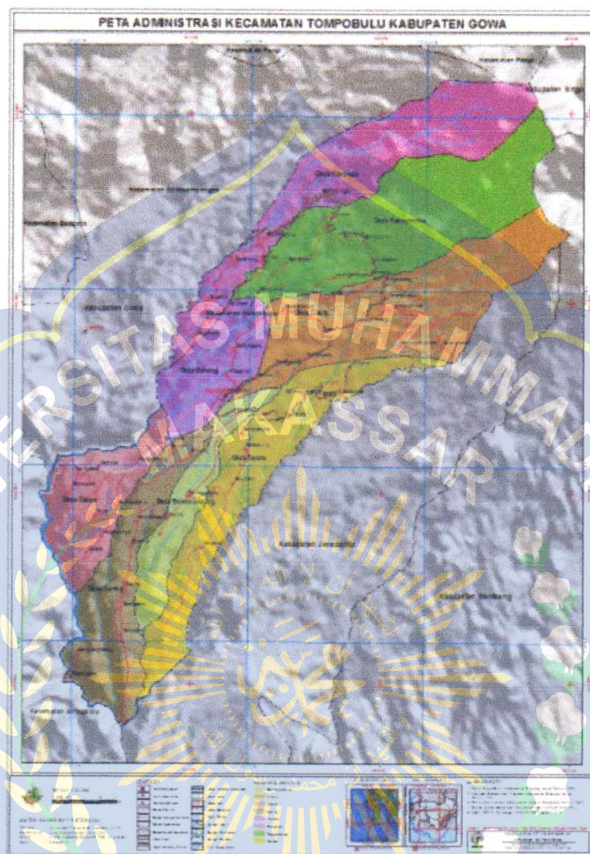
Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai-nilai budaya dan agama,
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan,
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada intrekoneksi antar wilayah dan sektor,
- 4) Meningkatkan pengembangann wilayah kecamatan, desa dan kelurahan,
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan demokratis.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu

Nama Kecamatan Tompobulu di Sukawesi Selatan terdapat di beberapa Kabupaten antara lain Gowa, Bantaeng dan Maros. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni *tompo* dan *bulu*. *Tompo* bermakna puncak dan *bulu* bermakna gunung. Dengan demikian tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan.

Gambar 4.2
Peta Kecamatan Tompobulu



Tompobulu berbatasan dengan Sinjai pada sebelah utara, Kabupaten Jeneponto di sebelah selatan, Kecamatan Biringbulu di sebelah barat dan kabupaten Jeneponto sebelah barat.

Terdapat beberapa akses untuk mencapai kecamatan ini antara lain akses Pallangga - Bungaya, jalan Palleko (Takalar) – Biringbulu dan Sungguminasa – Jeneponto.

Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan sebagai

pembagian wilayah administratifnya. Berikut nama desa dan kelurahan di Kecamatan Tompobulu

- 1) Kelurahan Malakaji
- 2) Kelurahan Cikoro
- 3) Desa Datara
- 4) Desa Rappolembba
- 5) Desa Rappoala
- 6) Desa Tanete
- 7) Desa Garing
- 8) Desa Bontobuddung

Jumlah penduduk Kecamatan Tompobulu (2019) sebesar 29.749 jiwa yang terdiri dari 14.385 jiwa laki-laki dan 15.364 jiwa perempuan dengan jumlah rumah tangga 7.534. penduduk Tompobulu umumnya berprofesi sebagai petani padi dan kopi yang lainnya bergerak pada usaha sektor non pertanian.

Visi dan misi sangat penting dalam kemajuan sebuah system pemerintahan di Kecamatan Tompobulu. Adapun Visi dan Misinya sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Tompobulu Sebagai Kecamatan Yang Maju dan Unggul Dalam Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Misi Kecamatan Tompobulu:

- 1) Meningkatkan kualitas aparatur dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintah dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi antar wilayah dan kecamatan.
- 3) Meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan peran lembaga sosial, keagamaan dan kebudayaan.

3. Gambaran Umum Kelurahan Cikoro

Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah 17,33 km² merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, luas ini setara 13,08% luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan, 12 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Cikoro sebagian besar wilayahnya berada pada lereng, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai,
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malakaji,
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rappolemba,
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

Secara morfologi daerah ini lebih dari 90% terdiri dari media berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 1000,50 meter dari atas permukaan laut. Dengan curah hujan sedang yaitu rata-rata 2500 sampai 3000 mm setiap tahunnya, dengan suhu udara rata-rata berada pada 10C sampai 15C.

a. Keadaan Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk sebanyak 3.932 jiwa/orang, yang terdiri atas 2004 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 1.928 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 821 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk Kelurahan Cikoro berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Komposisi penduduk berdasarkan tingkat usia kelurahan cikoro, kecamatan tompobulu kabupaten gowa tahun 2019

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentasi (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	< 4 Tahun	148	162	310	7,9
2.	5-9 Tahun	235	268	503	12,8
3.	10-14 Tahun	346	233	579	14,7
4.	15-24 Tahun	422	445	867	22,1
5.	25-49 Tahun	539	545	1084	27,4
6.	50-54 Tahun	178	143	321	8,2
7.	55 ke atas	139	132	271	6,9
Jumlah		2004	1928	3932	100

Kantor Kelurahan Cikoro 2020

Dengan demikian tampak bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, dengan selisih sebesar 76 orang.

Apanila dilihat dari penduduk berdasarkan usia, maka penduduk Kelurahan Cikoro lebih didominasi oleh penduduk yang berusia muda dan hanya sebagian kecil yang berusia lanjut.

b. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk yang berada di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, semuanya menganut agama islam, sedangkan sarana peribadatan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sarana Peribadatan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

No	Sarana Peribadatan	Banyaknya (Buah)	Presentasi (%)
1.	Masjid	5	31,3
2.	Mushollah	11	68,7
Jumlah		16	100

Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro, 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana peribadatan di Kelurahan Cikoro sebanyak 5 buah masjid dan 11 buah mushollah.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu sumber potensial suatu daerah karena memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dimana sasarannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui penduduk berdasarkan mata pencahariannya di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Cikoro
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentasi (%)
1.	Petani	872	80,8
2.	Pedagang	112	10,4
3.	Peternak	13	1,2
4.	Pegawai	42	3,9
5.	Sopir	23	2,1
6.	Wiraswasta	17	1,6
Jumlah		1079	100

Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat hidup dari mata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 872 orang. Profesi petani di daerah ternyata sangat besar dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Seperti pedagang, peternak, pegawai, sopir dan wiraswasta.

d. Kelompok Tani Kelurahan Cikoro

Kelompok tani Kelurahan Cikoro beranggotakan 25 orang yang di ketuai oleh M. Roa yang dibentuk pada tanggal berikut nama-nama anggota kelompok tani Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Tabel 4.5
Anggota kelompok tani Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Gowa

No	Nama Anggota Kelompok Tani	Jabatan
1.	M. Roa	Ketua
2.	Syarif. S	Sekretaris
3.	Ahmad muras S.E	Bendahara
4.	Abdullah	Anggota
5.	Sanuddin	Anggota
6.	Baso'	Anggota
7.	Ahmad	Anggota
8.	Basri	Anggota
9.	Malle	Anggota
10.	Jumaling	Anggota
11.	Ma'ing	Anggota
12.	Bi'bong	Anggota
13.	Safaruddin	Anggota
14.	Amiruddin	Anggota

15.	Manong	Anggota
16.	Sattu	Anggota
17.	Arifuddin	Anggota
18.	Dahlan	Anggota
19.	Arsyad	Anggota
20.	Sirajuddin	Anggota
21.	Hamid	Anggota
22.	Azis	Anggota
23.	Syaru'	Anggota
24.	Hasim	Anggota
25.	Iwan	Anggota

Sumber: Kantor Kelurahan Cikoro, 2020.

B. Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Pada dasarnya, proses pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan proses kajian masalah merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah direncanakan bersama dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa maka penulis melakukan penelitian dan observasi lapangan yang akan dibahas sebagai

berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Keterlibatan Masyarakat

a) Kualitas

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya suatu barang atau jasa. Pemerintah Kelurahan Cikoro dalam rangka pengelolaan pemberdayaan masyarakat telah didukung dengan baik dan matang guna mendukung program tersebut. Beberapa inovasi telah dilakukan salah satunya ialah pembuatan kopi bubuk dalam bentuk kemasan. Dimana kelompok tani Kelurahan Cikoro memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan mengembangkan dan membuat sebuah inovasi baru yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya pemerintah dan kelompok tani marakisaya yang di bantu dengan masyarakat Kelurahan Cikoro dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakukan sebuah terobosan baru dengan membuat kopi dalam bentuk kemasan yang di namai Kopi Laris dan Kopi Barista. Dengan adanya inovasi ini masyarakat Kelurahan Cikoro mampu meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan ekonomi masyarakat di Kelurahan sehingga ketahanan pangan tetap Terpenuhi”
(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro pemerintah, masyarakat dan kelompok tani bekerjasama dengan membuat sebuah inovasi yang diharapkan dapat menunjang ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro. Sesuai dengan yang dikatakan FIVIMS (2005) ketahanan pangan adalah kondisi

ketika semua orang pada segala waktu, secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya inovasi pembuatan kopi kemasan yang dilakukan pemerintah, kelompok tani dan masyarakat merupakan sebuah solusi yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dimana yang dulunya pendapatan petani Kelurahan Cikoro hanya 5000 – 7000/ liter. Namun dengan adanya kopi kemasan ini, masyarakat dan kelompok tani tidak lagi menjualnya secara literan tetapi menjual secara kemasan, untuk kopi laris sendiri harganya 10.000 Perbungkus, dengan berat 190 Gr. Sedangkan untuk kopi Laris di bandrol dengan harga 20.000 perbungkus dengan berat 190 Gr. Kopi laris disajikan dalam perpaduan antara jenis kopi arabika dan robusta, kemudian di masukkan kedalam kemasan. Kopi laris telah mengandung gula sehingga yang menyeduhnya tidak perlu lagi menambahkan gula. Berbeda dengan kopi barista, kopi barista memakai proses madu, dimana kami memantapkan rasa dan aroma khas dalam kemasan produk kopi ini. dengan demikian ketahanan pangan menjadi meningkat”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi yang dilakukan pemerintah, kelompok tani dan masyarakat pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Sulistiyani (2004) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah paling tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah di daerah yang bersangkutan (melalui dukungan pemberdayaan ekonomi).

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh petani kopi Kelurahan

Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Kami petani kopi Kelurahan Cikoro hanya tau berkebun tapi setelah diajak pemerintah Kelurahan Cikoro dengan membuat kopi kemasan membuat pendapatan kami meningkat yang dulunya hanya berkisar di 5000 – 7000/ liter kini semakin meningkat karna dijual dalam bentuk kemasan yang harganya 10.000-20.000 / kemasan. (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 04 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas pokok pemerintah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian perangkat pemerintah di daerah dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat salah satunya ialah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

b) Kuantitas

Sebagai upaya meningkatkan jumlah produksi kopi di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu dilakukan dengan memberikan pendampingan pada petani melalui pelatihan-pelatihan, guna menambah pengetahuan petani, usaha untuk meningkatkan pemberdayaan bagi petani adalah melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yakni dengan memfasilitasi usaha tani dengan memberikan penyuluhan secara berkala dan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pemberdayaan masyarakat petani, pada dasarnya pemerintah Kelurahan Cikoro bekerjasama dengan masyarakat itu sendiri untuk merumuskan sebuah program atau solusi terhadap permasalahan yang terjadi. melihat persaingan yang sangat ketat, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk bagaimana masyarakat di wilayah Kelurahan Cikoro untuk terlibat sepenuhnya dalam membangun atau memajukan wilayahnya hal terbukti atas keikutsertaan masyarakat saat ini, dengan memberikan perumusan-perumusan yang mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian salahnya satunya meberikan kemas atau label atas produk pertanian yang dihasilkan.” *(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).*

Hasil wawancara dengan informan dari Kelurahan Cikoro dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini ketahanan pangan. Dengan adanya kegiatan ini dalam berwirausaha serta aktif dan kreatif dalam mengembangkan hasil tani di Kelurahan Cikoro.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu tanggung jawab yang sampai ini terus dijalankan. Sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Gowa, badan penyuluhan pertanian yang bekerjasama atau melibatkan pihak swasta maupun masyarakat, memberikan tugas agar berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut maka dilakukanlah penyuluhan yaitu melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengecekan secara terus menerus agar masyarakat petani dapat meningkatkan kualitasnya dalam prosesnya.” *(Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020).*

Adanya pelaksanaan program terkait pemberdayaan masyarakat petani atau kelompok tani melalui pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah melalui instansi yang terlibat sangat berarti bagi masyarakat petani di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, dalam hal ini dapat meningkatkan keterampilan masyarakat petani dalam proses pertaniannya, dengan melalui penyuluhan tersebut tentunya masyarakat akan lebih mengerti tentang cara-cara pengolahan tanah yang baik, penggunaan pupuk, pemberantasan hama sampai pada pengelolaan setelah panen. Karena peran pemerintah melalui program-program penyuluhan yang dilaksanakan akan sangat menentukan kemajuan kualitas pertanian di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas terus dilakukan karena pada dasarnya rata-rata sumber pendapatan masyarakat disini dihasilkan melalui bekerja sebagai petani, jadi untuk itu diharapkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disini dapat terpenuhi yang mendukung meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat dalam mengelola pertanian”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani bahwa dalam hal kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat, telah dilakukan beberapa upaya agar masyarakat secara sadar ikut terlibat dalam memajukan dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Cikoro namun belum dicapainya hasil yang maksimal karena beberapa permasalahan yang kurang

mendukung keterlibatan masyarakat dalam memajukan usaha tani di Kelurahan Cikoro.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau kami selaku petani selalu bekerja dengan baik agar hasilnya juga baik, masyarakat petani di kelurahan cikoro tentunya sangat bersemangat dalam mengelola lahan pertanian untuk memberikan hasil yang terbaik dan memajukan kesejahteraan masyarakat. beberapa upaya yang dilakukan pemerintah saat ini tentunya memberikan manfaat yang mendukung atau meningkatkan kemampuan petani namun perlu melihat lagi apa yang di butuhkan petani agar kualitas petani meningkat dan masyarakat lebih termotivasi lagi dalam bertani”. *(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Petani Kopi Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Kami petani kopi Kelurahan Cikoro pernah diberikan pelatihan pengembangan usaha kopi yang diselenggarakan BBPP Kabupaten Gowa serta diberikan pemahaman dalam mengelola atau cara kerja berkelompok dalam menjalankan usaha-usaha tani di wilayah kelurahan Cikoro.” *(Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani kopi bahwa, partisipasi petani kopi cukup signifikan dan didukung oleh pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas salah satunya dengan memberikan pelatihan dalam pengembangan usaha kopi. Melalui kegiatan tersebut para petani kopi mampu berinovasi sehingga kopi yang dihasilkan dapat diolah sendiri melalui kemasan atau membuat produk kopi sendiri lalu di pasarkan.

2. Perancangan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, koordinasi dan pengembangan berbagai aktivitas pengembangan program atau proyek masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial (*social well-being*) masyarakat. Sebagai suatu kegiatan politik, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga serta instansi terkait yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan sampai evaluasi terhadap program tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program yang perumusannya melalui perancangan program.

Beberapa Perancangan program yang ingin dilakukan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yaitu:

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat seperti RT/RT, LPMK (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam berusaha dan berwirausaha.

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan, melalui musyawarah.

4. Pembentukan Kelompok Tani

Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakukan perancangan program yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapasitas kelompok tani dengan merumuskan kebijakan-kebijakan teknis seperti penyuluhan, pengadaan bibit dan sebagainya. Hal ini telah terprogram yang sejalan dengan misi dinas pertanian Kabupaten Gowa yang bertujuan memperkuat kelembagaan pertanian” (*Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan mulai dari penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan hingga sistem perencanaan

untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan bisa tercapai. Sesuai dengan yang dikatakan Robbins dan Coulter (dalam Saifullah 2005) perencanaan program adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuannya organisasi tersebut secara menyeluruh, serta meluruskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Jadi terkait dengan perancangan program, sekiranya pemerintah yang terlibat telah melakukan merancang sebuah konsep yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti penyuluhan, pemberian bantuan dan pengawasan. Perancangan tersebut telah disusun seefektif mungkin agar kiranya para petani mampu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat terwujud terutama dalam hal produksi pertanian secara kualitas maupun kuantitas” (Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas kelompok tani maka perlu adanya pemberian pelatihan atau pembinaan kepada kelompok tani. Pemerintah Kelurahan Cikoro telah menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai misi pemerintah Kabupaten Gowa yang dapat membantu petani dalam menjaga dan mengembangkan produksi pertanian jika perancangan tersebut diterapkan dengan baik.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Adanya program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat cukup menunjang dalam meningkatkan kemajuan masyarakat tani yang melalui perencanaan penyuluhan pertanian guna pengembangan kapasitas masyarakat tani. Namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan masyarakat tak sepenuhnya paham dengan perencanaan program yang dimaksud oleh pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pendekatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 Agustus 2020)*.

Berdasarkan hasil observasi dengan ketua kelompok tani, menunjukkan bahwa upaya perancangan program yang dimaksud oleh pemerintah merupakan salah cara yang akan menunjang peningkatan kualitas petani dalam hal ini pengembangan pengetahuan dan kemampuan melalui sosialisasi atau penyuluhan serta pembinaan yang terkait dengan pertanian. Melalui kegiatan tersebut diharapkan petani mendapatkan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pertanian dan keterlaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Banyak program yang dibuat oleh pemerintah yang menunjang pemberdayaan masyarakat, hal tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu meskipun kami tidak sepenuhnya memahami maksud dan tujuan perancangan program yang akan dibuat pemerintah karena kami sendiri setiap harinya berkegiatan di kebun dengan membawa cangkul. Sepengetahuan kami ada beberapa program pemerintah yang rencananya akan diadakan yaitu penyuluhan, pembinaan dan pembentukan kelompok tani.” *(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 September 2020)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah

tentunya membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan campur tangan dan bantuan dari pemerintah. Sesuai dengan perkataan Sugiri 2012 dalam konteks pembiayaan program, bantuan dari pemerintah merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan daya (baik untuk sumber daya maupun modal, peluang, pengetahuan dan keadilan) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri mereka, agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Petani Kopi Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai program pemberdayaan masyarakat petani Kelurahan Cikoro, kami kurang paham akan hal itu karena jarang kami bertemu atau mendengar informasi tentang program pemberdayaan petani oleh pihak kelurahan apalagi kami ini kebanyakan beraktivitas di kebun supaya kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”. *(Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, perancangan program pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Cikoro tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat yang aktivitasnya sebagai petani. pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan dalam hal terkait pengembangan kemampuan petani dalam meningkatkan produksi hasil tani. Hal inilah yang akan menunjang kualitas kemampuan petani dalam mengatasi

berbagai macam persoalan sehingga sangat perlu disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi.

3. Pelaksanaan program

Suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi. Pelaksanaan program merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara untuk melaksanakan, suatu proses rangkaian tingkat lanjut setelah program ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun opsional atau kebijaksanaan mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pelaksanaan pogram pemberdayaan masyarakat pemerintah Kelurahan Cikoro bekerjasama dan mengajak kelompok tani dan masyarakat untuk sepenuhnya terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Pelaksaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan Cikoro melalui kerjasama beberapa instansi terkait yaitu pemberian sosialisasi, pelatihan dalam pengembangan teknik pertanian yang dilaksanakan setiap bulannya atau sesuai kebutuhan petani.” *(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perancangan kelompok tani dan masyarakat sepenuhnya terlibat dalam kegiatan yang diadakan pemerintah. Salah satunya adalah pembuatan rancangan program untuk menunjang ketahanan pangan di

Kelurahan Cikoro kedepan. Salah satu programnya ialah pembentukan program peningkatan keberdayaan masyarakat di Kelurahan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan yang ditempuh dengan beberapa cara antara lain dengan menguatkan kapasitas pemerintah kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak lain seperti TNI-POLRI. Beberapa cara tersebut dilakukan agar penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat terimplementatif secara maksimal.

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Melakukan atau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani di wilayah Kelurahan Cikoro yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha tani, memberikan keterampilan secara terus menerus, hal ini dilakukan agar masyarakat petani dapat memahami dan menambah wawasan informasi tentang meningkatkan pertanian”. *(Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia dilakukan melalui tahap sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud ialah pengenalan pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya dan memperkenalkan seperti apa penggunaan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Kemudian kegiatan pelatihan dimaksudkan memberikan keterampilan mengenai pola tanam dan teknik menanam agar petani mampu

meningkatkan produksi hasil pertaniannya. Dengan adanya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani diharapkan dapat memotivasi dan membantu para petani.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pelaksanaan program yang ditujukan kepada masyarakat dan kelompok tani pada umumnya ada peningkatan misalnya dalam perawatan, pemberantasan hama dan penggunaan pupuk. Selain itu masyarakat sebagian juga lebih termotivasi dengan ada keterlibatan pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hasil produksi pertanian”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani bahwa dengan adanya pelaksanaan program yang diadakan oleh pemerintah Kelurahan Cikoro untuk masyarakat dan kelompok tani, tentunya membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani. selain itu dengan adanya hal tersebut masyarakat petani lebih termotivasi dan sadar akan tanggung jawab mereka dalam menjaga hasil pertanian mereka serta memajukan hasil pertanian di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani tentunya mendapat respon yang positif karena masyarakat merasa dibantu. Untuk program nya pada awal-awalnya diadakan penyuluhan atau sosialisasi dan pemberian keterampilan tentang cara bercocok tanam, pemberian pupuk, perawatan dan peningkatan produksi pertanian kemudian cara berinovasi hasil produk pertanian cuman kalau bisa pemerintah juga memberikan solusi kepada petani yang saat ini terkendala dalam hal kebutuhan pupuk Karena saat ini

bantuan pupuk sangat diharapkan petani Kelurahan Cikoro”. (Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Cikoro telah melakukan tugasnya dengan baik karena masyarakat merasa terbantu. Dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang pertanian membuat masyarakat lebih memahami cara bercocok tanam dengan baik. Sesuai dengan perkataan Sugiri 2012 bahwa dalam konteks pembiayaan program, bantuan dari pemerintah merupakan suatu upaya pembiayaan masyarakat, atau merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan daya (baik untuk sumber daya maupun modal, peluang, pengetahuan, dan keadilan) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri mereka, agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sama halnya yang disampaikan oleh Petani Kopi Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Kami petani kopi Kelurahan Cikoro pernah diberikan penyuluhan dan pelatihan cara bercocok tanam sampai pada pengembangan usaha kopi yang diselenggarakan BBPP Kabupaten Gowa serta diberikan pemahaman dalam mengelola atau cara kerja berkelompok dalam menjalankan usaha-usaha tani di wilayah Kelurahan Cikoro. Usaha pemerintah saat ini cukup cukup mendukung kebutuhan masyarakat petani kelurahan cikoro namun tentunya saat ini petani mengharapkan adanya bantuan pupuk untuk membantu masyarakat yang merasa kekurangan pupuk” (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 04 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani kopi bahwa, partisipasi petani kopi cukup signifikan dan didukung oleh pemerintah dengan

memberikan berbagai fasilitas salah satunya dengan memberikan pelatihan dalam pengembangan usaha kopi. Melalui kegiatan tersebut para petani kopi mampu berinovasi sehingga kopi yang dihasilkan dapat diolah sendiri melalui kemasan atau membuat produk kopi sendiri lalu di pasarkan.

4. Keterlibatan

Keterlibatan yaitu keikutsertaan masyarakat, pemerintah dan swasta dalam melakukan perancangan dan pelaksanaan program dan juga ikut memikul tanggungjawab didalamnya. Keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban yang berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi atau keterlibatan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan partisipasi yaitu masyarakat yang secara sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian, secara efektif dan efisien mampu direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan.

a) Pemerintah

Hal ini sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu dibantu oleh instansi lain yaitu BBPP (Balai Besar Penyuluhan Pertanian) Kabupaten Gowa dalam melakukan peningkatan partisipasi atau keterlibatan dengan memberikan pemahaman atau

sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk memajukan desa dalam hal ini menjaga ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu pihak pemerintah dan BBPP Kab. Gowa melaksanakan program-program pemberdayaan yang menunjang masyarakat, petani melalui pembinaan, penyuluhan dan pengawasan agar petani dapat berkembang dan mampu meningkatkan hasil pertanian sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan pemerintah kelurahan cikoro dalam hal pemberdayaan masyarakat petani tentunya terus berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat petani dalam mengembangkan usaha mereka mulai dari menanam, membuat bibit dan meningkatkan hasil tani. Kemudian untuk kondisi pangan di kelurahan cikoro masih dalam kondisi stabil, karena setiap waktu panen sangat sedikit yang terjadi gagal panen di kelurahan cikoro” *(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).*

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pemerintah kelurahan dengan dibantu BBPP Kab. Gowa telah melakukan berbagai kegiatan salah satunya sosialisasi dan penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat dan kelompok tani. Dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah, respon masyarakat cukup positif dengan ikut berpartisipasi dengan ikut kegiatan yang diadakan pemerintah Kelurahan Cikoro dan BBPP Kabupaten Gowa.

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai itu tentunya kami selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat petani. Melalui beberapa strategi yang telah dirancang, kami mengajak masyarakat petani untuk ikut berpartisipasi dan memegang tanggung jawab dalam meningkatkan hasil pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan secara rutin dan mengadakan pelatihan tentunya kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mandiri lagi dan menambah wawasan tentang pertanian.” *(Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam membina masyarakatnya atau memberdayakan masyarakatnya dengan memberikan program penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan tentang cara-cara bercocok tanam. Dalam kegiatan pemberdayaan yang di adakan pemerintah masyarakat cukup merespon dengan baik dengan ikut berpartisipasi secara sadar dalam arti masyarakat mulai/memahami bahwa dalam meningkatkan kebutuhan pangan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tujuan di harapan dapat tercapai.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan cikoro cukup baik dalam memberikan pemahaman kepada para petani, apalagi petani di Kelurahan Cikoro memang kurang pengetahuan mengenai tatacara pengelolaan pertanian. Kalau kebutuhan pangan masyarakat di kelurahan cikoro masih dalam keadaan baik, hanya saja masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan bantuan pupuk untuk petani agar hasil pertanian dapat meningkat”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020).*

masyarakat dan kelurahan. Dengan adanya pelatihan keterampilan yang diajarkan kepada masyarakat, masyarakat akan lebih bisa mengatur atau mengelola sesuatu menjadi mempunyai ekonomi dan bisa dikembangkan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pemberdayaan masyarakat tentang partisipasi atau keterlibatan tentunya pihak kelurahan telah melaksanakan hal tersebut dengan membentuk kelompok tani di kelurahan cikoro, yang dimana anggotanya adalah petani itu sendiri. Tujuan daripada melaksanakan program tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan terkait pertanian kepada petani agar mampu meningkatkan hasil produksi.”
(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, pihak pemerintah melaksanakan program-program pemberdayaan dengan membentuk kelompok tani yang menunjang masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan dan pengawasan agar petani dapat berkembang yang mampu meningkatkan hasil pertanian sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sejalan dengan hasil wawancara penulis Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai keterlibatan masyarakat, secara pelaksanaan itu sudah bisa kita lihat salah satunya melalui kelompok tani yang sudah dibentuk. Jadi, melalui kelompok tani tersebut ada beberapa program yang telah dilaksanakan masyarakat petani Kelurahan Cikoro mulai dari sosialisasi, pelatihan sampai pada pengemasan atau produksi kopi laris dan kopi barista kemudian, sering terlibat program pelatihan pertanian dan pedesaan yang membahas tentang pengelolaan dan

memberikan wawasan tentang ilmu pertanian.” (*Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, masyarakat petani secara aktif diberikan pemahaman membudidayakan tanaman kopi secara tepat dan efektif yang bertujuan meningkatkan produksi secara kuantitas dan kualitas dan kegiatan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat petani agar dapat mandiri serta dapat mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku kelompok tani sepenuhnya terlibat dalam pemberian informasi sampai pada pengelolaan perancangan maupun pelaksanaan program yang berhubungan dengan pertanian. Untuk pelaksanaan, kami senantiasa berkoordinasi meskipun bantuan dari pemerintah itu tidak sepenuhnya selalu ada, jadi yah untuk kebutuhan yang diperlukan petani belum maksimal adanya terutama pupuk yang dipakai dalam bertani. (*Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kelompok tani dalam pelaksanaan program yang diadakan pemerintah cukup signifikan dan didukung oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan dalam penyuluhan secara berkala. Melalui kegiatan tersebut para petani kopi mampu berinovasi sehingga kopi yang dihasilkan dapat di kembangkan sendiri.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya tentang keterlibatan kami selalu terlibat dalam hal pengelolaan pertanian, apalagi kami disini sudah ada kelompok tani Marakasiya dari situlah kami selalu bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan pertanian berupa pupuk dll. Cuman, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan petani sehingga kami selaku petani mampu secara maksimal menjalankan tanggung jawab kami.” *(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa proses pemnerdayaan yang dilakukan terhadap kelompok tani Kelurahan Cikoro yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki setiap anggota merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar para anggota kelompok tani mampu mengkoordinasikan diri mereka sendiri agar bisa hidup lebih sejahtera.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Petani Kopi Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Kita disini petani kopi setiap harinya bekerja di kebun kopi. Ada juga kegiatan kalau pemerintah mengadakan pelatihan biasanya kami diajak terlibat disitu kami diberikan pemahaman bagaimana bekerja sama, meningkatkan hasil pertanian, dan mengelola hasil pertanian. Cuman pemerintah juga sepenuhnya harus terlibat mendengar apa yang menjadi kebutuhan yang mendukung usaha kami utamanya persoalan pupuk harus lebih diperhatikan” *(Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Cikoro terbilang penting dimana pemerintah mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani dan masyarakat setempat. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga meningkatkan hasil produksi. Namun pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan pertanian berupa pupuk.

5. Terwujudnya ketahanan pangan di kelurahan

Dalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan sumber pangan untuk itu perlu dilakukannya pemberdayaan petani guna mewujudkan ketahanan pangan. Namun kerap muncul permasalahan di berbagai tempat di Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah sesuai dengan amanat desentralisasi harus mampu membuat program untuk pemberdayaan petani guna mewujudkan ketahanan pangan, tak terkecuali di Kelurahan Cikoro. Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Kelurahan Cikoro merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian selatan wilayah kabupaten gowa. Dimana wilayah Kelurahan Cikoro merupakan salah sumber potensial yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, kesejahteraan dikatakan belum makmur dan sejahtera hal ini dikarenakan produksi hasil tani yang kurang produktif serta model kerja yang dikeluarkan kurang seimbang dengan hasil panen. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan petani dirasa masih kurang melihat hal tersebut sesuai dengan otonomi daerah pemerintah Kabupaten Gowa mempunyai kewenangan mengembangkan pertaniannya dengan melakukan pemberdayaan kepada petani. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan serta mengajak petani dalam membangun usaha tani hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat petani dalam

menjalankan usaha taninya agar mendapatkan hasil yang lebih produktif, lebih baik serta beragam. Hasil yang lebih baik tersebut dapat menunjang terwujudnya suatu ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Cikoro dalam hal pemberdayaan masyarakat petani tentunya terus berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat petani dalam mengembangkan usaha mereka mulai dari menanam, membuat bibit dan meningkatkan hasil tani. Ketersediaan pangan saat ini masih dalam kondisi yang baik bahkan melebihi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan meskipun di tengah pandemi covid-19 hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah kabupaten gowa”. *(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya program pemberdayaan pada masyarakat dan kelompok tani merupakan suatu faktor yang dapat mendukung berkembangnya pertanian termasuk di Kelurahan Cikoro. Program pemberdayaan yang diberikan membuat masyarakat, petani dan kelompok tani menjadi lebih terampil dan berpengetahuan selanjutnya akan berpengaruh pada hasil usaha tani untuk menjadi lebih baik sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan.

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, secara pelaksanaan itu sudah bisa kita lihat salah satunya melalui kelompok tani yang sudah dibentuk. Jadi, melalui kelompok tani tersebut ada beberapa program yang telah dilaksanakan masyarakat petani kelurahan cikoro yaitu produksi kopi laris dan kopi

barista, melalui program tersebut diharapkan ketahanan pangan dapat terjaga di kelurahan cikoro”. (*Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 september 2020*).

Berdasarkan hasil observasi dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dan dukungan lainnya sangat dibutuhkan melalui program-program yang telah dirancang seperti pembentukan kelompok tani, pemberian pemahaman serta pengawasan secara intensif dilakukan agar hasil pertanian dapat maksimal yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku kelompok tani sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan perancangan maupun pelaksanaan program yang berhubungan dengan pertanian. Untuk pelaksanaan, kami senantiasa berkoordinasi meskipun bantuan dari pemerintah itu tidak sepenuhnya selalu ada, jadi yah untuk kebutuhan yang diperlukan petani belum maksimal adanya terutama pupuk yang dipakai dalam bertani. (*Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui kelompok tani dan masyarakat Kelurahan Cikoro. Strategi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan masalah perihal pertanian dilakukan dengan mengadakan penyuluhan lapangan. Penyuluhan dilakukan terkait tentang tatacara bercocok tanam yang baik dan benar, selain itu juga dijelaskan cara mengatasi permasalahan tentang pertanian . selain itu bantuan dari pemerintah juga sangat bermanfaat bagi para kelompok tani untuk

meringankan usaha taninya dan mampu mendapatkan hasil yang maksimal sehingga ketahanan pangan tetap stabil.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Anggota Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya tentang keterlibatan kami selalu terlibat dalam hal pengelolaan pertanian, apalagi kami disini sudah ada kelompok tani Marakisaya dari situlah kami selalu bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan pertanian berupa pupuk dll. Cuman, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan petani sehingga kami selaku petani mampu secara maksimal menjalankan tanggung jawab kami.” *(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020)*.

Berdasarkan hasil observasi dengan ketua kelompok tani, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan, konsep atau perancangan program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah harus dipahami baik oleh masyarakat petani. Koordinasi antara pemerintah dengan petani sudah terbangun dengan baik namun beberapa permasalahan atas keluhan masyarakat petani tidak semuanya terselesaikan dengan baik, khususnya pada permasalahan pupuk agar terjadi peningkatan hasil pertanian di Kelurahan Cikoro.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya dukungan secara maksimal dari pemerintah melalui perumusan kebijakan dalam merancang sebuah program. Pemerintah yang sebagai fasilitator harus memberikan pembinaan tepat kepada para petani serta memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi petani.

C. Dampak Dari Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak asasi yang layak di penuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk disuatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Ketahanan pangan juga sangat penting karena mendukung ketahanan pangan masyarakat. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, pemberdayaan masyarakat diperlukan agar ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Dampak Positif Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangka potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat. tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang terdapat disekitar. Ada banyak sekali manfaat atau sisi positif dengan adanya pemberdayaan bagi masyarakat ini. Berikut beberapa sisi positif pemberdayaan masyarakat.

- a. Menjadikan masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam mengelola pangan;

Perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang dilakukan langsung oleh masyarakat. perekonomian ini berasal dari masyarakat dan bersumber dari potensi serta kekuatan masyarakat dalam menjalankan perekonomian mereka sendiri.

Dengan begitu, berarti masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam menentukan arah perekonomiannya sendiri. Mereka yang menentukan apa potensi yang bisa diangkat dan bagaimana untuk menjalankan potensi tersebut. Dengan cara ini pula masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam menjalankan ekonominya sendiri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani, yang mengatakan bahwa:

“Berkat adanya program pemberdayaan di kelurahan cikoro, kami selaku kelompok tani sangat terbantu dan bersyukur atas tindakan pemerintah dalam melihat permasalahan di masyarakat, sejak terbentuknya kelompok tani di kelurahan cikoro tentunya merasa ada perkembangan dalam mengelola pertanian serta hasil pertanian cukup meningkat. Masyarakat mulai banyak yang aktif atau ikut memajukan lahan pertanian dan sadar akan tanggung jawab sebagai petani”. *(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa melalui proses pemberdayaan, masyarakat dan kelompok tani adalah ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya. Peningkatan pendapatan

akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam.

- b. Adanya perubahan struktural perekonomian dalam peningkatan ketahanan pangan;

Perubahan struktural ekonomi yang dimaksud adalah perubahan ekonomi dari sistem tradisional ke sistem ekonomi modern.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala balai besar pelatihan pertanian Kab. Gowa, yang mengatakan bahwa:

“Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang penting terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Untuk di wilayah kabupaten Gowa ketersediaan pangan dipastikan aman karena produktivitas pangan di daerah ini cukup baik. Kemudian sama halnya untuk di wilayah Kelurahan Cikoro sampai sejauh ini belum ditemukan persoalan serius terkait ketersediaan pangan di wilayah tersebut dalam kata lain masih dalam keadaan aman. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang sampai ini mampu menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah dengan program pemberdayaannya itu mampu diserap oleh masyarakat sehingga dalam proses pertanian ada peningkatan yang terjadi yang mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi aman”. (Hasil wawancara dengan SB pada tanggal 15 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa, ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat. Keadaan pangan di Kelurahan Cikoro cukup baik, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat memberikan dampak baik bagi peningkatan kemampuan masyarakat tani sehingga ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro dalam keadaan aman.

- c. Terjalannya suatu kemitraan yang baik antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani dan petani;

Melakukan pemberdayaan masyarakat tidak hanya cukup dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan yang sama untuk berusaha atau memberikan suntikan modal semata. Namun harus ada kerjasama atau kemitraan yang baik antara yang telah maju dengan masih lemah atau yang belum berkembang. Dengan cara ini antara satu dengan yang lain bisa menguatkan dan memberikan stimulan bagaimana cara menjalankan perekonomian agar kuat dan berkembang. Sehingga satu dan yang lainnya bisa menjaga agar semuanya maju.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Kelurahan Cikoro, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemberdayaan di wilayah kelurahan Cikoro sudah berjalan dengan baik, dilihat dari kesadaran masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup mereka dalam arti melalui partisipasi yang di berikan mereka betul-betul menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus di laksanakan pemerintah itu sendiri, melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat itu sendiri. Melalui program-program yang dilaksanakan, sejalan dengan hal tersebut, kondisi masyarakat saat ini telah mengalami peningkatan mulai dari pola pikir, aktivitas gotong royong, dan keadaan hasil pertanian juga mengalami peningkatan”. *(Hasil wawancara dengan MK pada tanggal 08 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara ddengan informan dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro itu berdampak baik kepada masyarakat petani. Pola pikir masyarakat tani mulai terbangun serta aktivitas gotong royong juga

dibangun masyarakat sehingga juga berdampak pada peningkatan hasil pertanian.

d. Dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan sebuah masyarakat. kehidupan masyarakat yang lebih baik sangat ditentukan dengan lingkungan itu sendiri. Baik secara fisik maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota kelompok tani yang mengatakan bahwa:

“Berkat adanya program pemberdayaan di kelurahan cikoro, kami masyarakat dan kelompok tani merasa terbantu, dilihat dari meningkatnya perekonomian.” *(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, kelompok tani maupun masyarakat membuat pendapatan menjadi meningkat.

e. Dapat meningkatkan keahlian masyarakat pada bidang tertentu dalam hal ini pertanian.

Sama halnya hasil wawancara penulis dengan anggota kelompok tani, yang mengatakan bahwa:

“Setiap kegiatan sosialisasi atau kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan cikoro sangat membantu masyarakat petani yang pada dasarnya kurang pemahaman akan masalah pertanian. Hasil dari setiap kegiatan pemberdayaan mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pengawasan sangat memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap usaha-usaha tani saya dan

teman-teman kelompok tani di kelurahan cikoro”.(Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 04 september 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap petani kopi di Kelurahan Cikoro dalam menanggapi dukungan pemerintah cukup baik, dimana pemerintah memberikan sebuah pemahaman tentang tata cara bercocok tanam yang efektif dan motivasi masyarakat juga mulai meningkat sehingga mereka sadara akan tanggung jawab masing-masing.

2. Dampak Negatif Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
 - a. Munculnya kecemburuan sosial antar petani dan kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat;

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani Kelurahan Cikoro yang mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya tentang kecemburuan antara anggota kelompok tani dan petani kopi yang tidak ikut terlibat tentang pemberdayaan pasti ada rasa cemburunya, tapi kami juga tidak terlalu menghiraukan karena pemerintah dan kelompok tani sudah sering mengajak untuk ikut sosialisasi atau penyuluhan tentang pertanian namun mereka biasa menolak dengan alasan sibuk”.(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 25 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah rupanya masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mulai dari pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan

pemerintah dan pihak BBPP Kabupaten Gowa. Padahal kegiatan tersebut sangat berguna untuk meningkatkan wawasan akan pertanian.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian serta adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok tani.
2. Perancangan program pemberdayaan masyarakat meliputi tahapan penyelidikan, perumusan masalah, penentuan tujuan dan target serta perumusan rencana kerja.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani berjalan dengan baik dilihat dari meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan pangan kelompok tani dan masyarakat Kelurahan Cikoro
4. Keterlibatan menunjukkan bahwa pihak pemerintah, masyarakat dan swasta melaksanakan program-program yang menunjang dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa melalui pembinaan, penyuluhan dan pengawasan.

Adapun dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani ditemukan dampak positif dan dampak negatif, meliputi:

1. Dampak positif yakni menjadikan masyarakat dan kelompok tani lebih mandiri dalam mengelola pangan, meningkatkan keahlian masyarakat dalam bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dampak negatif yakni munculnya kecemburuan sosial antara petani dan kelompok tani dalam program pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu diperhatikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa diharapkan seterusnya dapat berjalan dan tetap terjaga dengan baik, serta di tingkatannya partisipasi dari masyarakat setempat dalam kerjasama ini sehingga masyarakat, kelompok tani dan pemerintah kelurahan Cikoro dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada pada kelompok tani marakisyaya kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sehingga inovasi yang di buat nantinya akan lebih di kenal oleh masyarakat luas bukan hanya di Kelurahan Cikoro sendiri.

Daftar Pustaka

- Jonatan Lassa,. (2010). *Sage 2002*, 12–14.
- Agustrian,. Rizkan,. Izzudin, .(2018). Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu. *Journal of Community Development*, 1(1), 7–12.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Baldasaro, M. M. (2014). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menyulam pada ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. 7(2), 219–232.
- Ekonomi, F., & Pengaraian, U. P. (2015). *Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan desa (ppd) di kabupaten rokan hulu*. 4(1), 43–54.
- Fagi, A. M. (2014). Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman : Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 11–25.
- Herman, Y. (2016). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.
- Hueston, W. D., Heider, L. E., Harvey, W. R., & Smith, K. L. (1990). Determinants of high somatic cell count prevalence in dairy herds practicing teat dipping and dry cow therapy and with no evidence of *Streptococcus agalactiae* on repeated bulk tank milk examination. *Preventive Veterinary Medicine*, 9(2), 131–142. [https://doi.org/10.1016/0167-5877\(90\)90031-C](https://doi.org/10.1016/0167-5877(90)90031-C)
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*, 2(1), 115–125.
- Kusiawati, D. (2017). Pendidikan Luar Sekolah , Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Luar Sekolah , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Malang. *Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 59–72.
- Mantau, Z., & Bahtiar, B. (2010). Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 29(2), 123744. <https://doi.org/10.21082/jp3.v29n2.2010.p>

Daftar Pustaka

- Jonatan Lassa, . (2010). *Sage 2002*, 12–14.
- Agustrian, Rizkan, Izzudin, . (2018). Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu. *Journal of Community Development*, 1(1), 7–12.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Baldasaro, M. M. (2014). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menyulam pada ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. 7(2), 219–232.
- Ekonomi, F., & Pengaraian, U. P. (2015). *Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan desa (ppd) di kabupaten rokan hulu*. 4(1), 43–54.
- Fagi, A. M. (2014). Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman : Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 11–25.
- Herman, Y. (2016). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.
- Hueston, W. D., Heider, L. E., Harvey, W. R., & Smith, K. L. (1990). Determinants of high somatic cell count prevalence in dairy herds practicing teat dipping and dry cow therapy and with no evidence of *Streptococcus agalactiae* on repeated bulk tank milk examination. *Preventive Veterinary Medicine*, 9(2), 131–142. [https://doi.org/10.1016/0167-5877\(90\)90031-C](https://doi.org/10.1016/0167-5877(90)90031-C)
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*, 2(1), 115–125.
- Kusiawati, D. (2017). Pendidikan Luar Sekolah , Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Luar Sekolah , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Malang. *Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 59–72.
- Mantau, Z., & Bahtiar, B. (2010). Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 29(2), 123744. <https://doi.org/10.21082/jp3.v29n2.2010.p>

- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagement, I(2)*, 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah PELatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Institut Pertanian Bogor, 1*, 160.
- Polity, constitution and. (2012). Table of Contents Table of Contents یرتکدهجد با صمزا یپاتر یسزا. *European University Institute, 2*, 2–5. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Prawoto, N. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 8(2)*, 135–154. <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JOM/article/view/316>
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 9(1)*, 1. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Rachman, H. P. S. (2010). Aksesibilitas pangan: faktor kunci pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. *Pangan*.
- Rahman, A., & Yuliani, F. (2018). MITIGASI BENCANA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI METODE RESTORASI. *Sosio Informa*. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1460>
- Ruhaida, R., & Sunarti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Pada Kegiatan Pnpm Di Kelurahan Muarareja Kota Tegal. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota, 1(1)*, 46–55.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 20(1)*, 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>
- Saragih, R., & Agung, S. (2017). Peran Komunikasi politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Vol. 7 No. 1 (2017)*.

- Sitorus, M. (2005). Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan. *Majalan Ilmiah UNIKOM*, 7(1), 61–76.
- Soedarwo, V. S. D., Zuriyah, N., Yuliati, R., & Suwignyo. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal berbasis potensi lokal dalam membangun desa wisata adat. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 96–102.
- Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 2(1), 56–65.
- Suharto, E. (2010). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. In *refika editama*.
- Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN Heri Suharyanto * Abstrak. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Sumaryanto, N. (2016). Diversifikasi sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(2), 93. <https://doi.org/10.21082/fae.v27n2.2009.93-108>
- Tampubolon, J., Sugihen, B. G., Samet, M., Susanto, D., & Sumardjo, S. (2006). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Penyuluhan*, 2(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i2.2122>
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.
- Wilayah, I. K. U. (2016). *Kabupaten ngawi*. 1–11.
- Yefni, Y. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 42. <https://doi.org/10.24014/jmm.v3i2.6362>
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan
- Undang-undang pangan No. 18 Tahun 2012 tentang pangan

RIWAYAT HIDUP



INDAH RESKI RAMADANI atau yang lebih dikenal dengan nama Kiki lahir di Kabupaten Gowa tepatnya di Dusun Lembaya Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu pada hari Kamis 14 Januari 1999, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Dahlan dan Saenab. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN Lembaya Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tompobulu Kecamatan Tompobulu dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri Malakaji sekarang MA Negeri Gowa dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan stambuk 105641107016. Pada tahun 2021 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” dan mendapatkan Gelar S.IP.